

## **BAB II**

### **POTENSI DOMESTIK CHINA SEBAGAI AKTOR GLOBAL**

Bab ini merupakan penjabaran substansi mengenai potensi-potensi yang dimiliki China sebagai aktor penting hubungan internasional abad 21, baik di tatanan regional maupun internasional. Penjelasan substansi yang akan diberikan penulis mencakup penjabaran pada aspek politik, ekonomi, dan militer yang dimiliki China. Penjabaran meliputi dua hal yaitu, pemaparan mengenai kondisi secara riil di domestik pada bidang politik, ekonomi, dan militer beserta potensinya di tatanan global sehingga dapat menghadirkan China sebagai adidaya baru di panggung internasional. Dengan hal ini, maka bab ini akan memberikan muara pada mulai munculnya gambaran mengenai faktor-faktor yang berpotensi menjadi pengaruh (*influence*) dalam mengkaji proses kebijakan luar negeri China, dalam hal ini ialah mengenai kebijakan pembangunan pangkalan militer China di Djibouti, Afrika pada tahun 2016.

Kondisi domestik merupakan salah satu pertimbangan yang digunakan untuk mengambil sebuah kebijakan luar negeri (Fearon, 1998, hal. 299). Hal tersebut selaras dengan asumsi William D. Coplin dalam teorinya, Kebijakan Politik Luar Negeri, yang kemudian membagi penjelasan mengenai kondisi domestik ke dalam tiga kondisi yaitu politik, ekonomi, dan militer. Dalam memberikan gambaran mengenai kondisi domestik China tersebut, penulis akan memberikan pembahasan mengenai situasi politik China dengan cakupan materi mengenai sistem politik dan pemerintahan, aktor-aktor yang terlibat dalam pengambil kebijakan serta bagaimana alur proses pengambilan kebijakan di

China. Sedangkan pembahasan mengenai situasi ekonomi China meliputi tentang sektor perekonomian dan faktor yang mendorong laju perekonomian Australia. Dalam hal militer, pembahasan mengenai kekuatan militer yang dimiliki China akan menjadi fokus utama pembahasan. Ketiga hal tersebut akan dielaborasi secara runtut dengan memberikan pembahasannya tidak bertumpu pada ruang lingkup domestik, namun juga perannya yang telah dibangun China di tatanan global melalui tiga aspek kekuatan nasionalnya tersebut yaitu, aspek politik, ekonomi, dan militer.

#### **A. Lanskap Kondisi dan Potensi Politik China**

China merupakan negara terbesar di daratan Asia yang masih bertahan dengan sistem komunis (Nur, Arya, Putra, Caroline, & Januriswanti, 2013, hal. 4) . Meskipun demikian, terdapat hal penting yang patut diketahui yaitu, sebagai suatu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat serta sebagai pemegang hak veto dalam Dewan Keamanan PBB, China merupakan satu-satunya negara komunis dengan pola pemerintahan *party-state system* yang bertahan dengan angka pertumbuhan ekonomi tinggi diantara negara-negara G-20 lainnya (Lawrence & Martin, 2013, hal. 1). *Party-state system* ialah suatu bentuk sistem pengelolaan kenegaraan dengan keberadaan partai sebagai motorik utama baik sebagai pengontrol sosial masyarakat, ekonomi maupun politik (Suzuki, 2016, hal. 1). Sistem ini juga dapat diterjemahkan sebagai bagian dari sistem politik pemerintah nasional China yang saling terhubung erat dengan Partai Komunis sebagai partai tunggal yang tumbuh di tengah kehidupan politik China. Sistem

*party-state* menempatkan Partai Komunis China untuk memiliki peran signifikan dalam mengontrol dan mengarahkan sistem tugas-tugas pemerintahan, sedangkan pemerintah pusat memegang kekuasaan dan wewenang utama di dalam negara kesatuan Republik Rakyat Cina (Melati, 2013, hal. 2). Dengan demikian Partai Komunis China menjadi aktor yang menentukan corak pemerintahan China.

Arsitektur pemerintahan China dibangun diatas fondasi berbentuk republik dengan sistem demokrasi komunis. Hal ini membawa konsekuensi pada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di China sepenuhnya dikendalikan oleh negara sebagai aktor yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Nilai-nilai komunisme sangat kental terlihat dalam kehidupan politik di China. Hal ini dapat terlihat dari eksistensi *The Communist Party of China* (CPC) dengan mesin politbironya yang masih mewarnai kehidupan politik di Cina hingga saat ini. China menganggap sistem kendali terpusat oleh negara merupakan cara yang paling efektif untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban di negaranya. Dengan kekuatan partai yang mengontrol jalannya pemerintahan melalui *interlocking system* (proteksionis) dari personel partai dan struktur paralel pada partai, negara dapat tetap solid dan kuat. Birokrasi China diisi oleh anggota- anggota dari CPC, yang terdiri dari kaum elite (kepemimpinan), top elite (kader senior dalam partai dan pemerintahan), intermediete-level (staf partai dan kantor pemerintahan), dan basic level (kader yang berhubungan langsung dengan rakyat). CPC merupakan sumber

segala kekuasaan dan memiliki hak eksklusif untuk melegitimasi dan mengontrol semua organisasi politik. Partai Komunis China menentukan tujuan sosial, ekonomi, dan politik bagi masyarakat. Pencapaian tujuan-tujuan ini diusahakan melalui rekrutmen dalam organ-organ partai di tingkat pusat maupun daerah. Dalam setiap birokrasi China, terdapat bagian kecil partai yang dipimpin salah satu anggota CPC bahkan organ negara tersebut. Sehingga, partai selalu sanggup menggunakan kontrolnya dalam birokrasi negara dengan mengawasi personelnnya. Demikianlah, struktur negara dan partai di China yang sangat mencirikan dan menonjolkan nilai-nilai komunisme, yang diterapkan secara *Top and Down* (dari atas ke bawah) dimana segala peraturan atau kebijakan dari pemerintah, harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Cina (Melati, 2013, hal. 5).

Untuk memahami lebih jauh tentang pemerintah nasional China dan hubungannya dengan partai, terdapat dua pendapat umum yang perlu diketahui lebih dahulu: (1) CPC mengontrol dan mengarahkan sistem tugas-tugas pemerintahan yang kompleks. CPC merupakan institusi yang memegang peranan sentral dan mutlak, dan (2) China merupakan negara kesatuan di mana kekuasaan dan wewenang utama berada pada pemerintah pusat (Yuliantoro, 2012, hal. 44-46). Kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat tersebut digunakan oleh China untuk menanamkan nilai-nilai komunisme dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat melalui dewan atau lembaga yang berwenang, seperti Kongres Rakyat Nasional yang merupakan badan tertinggi pemerintah dan mempunyai tugas-

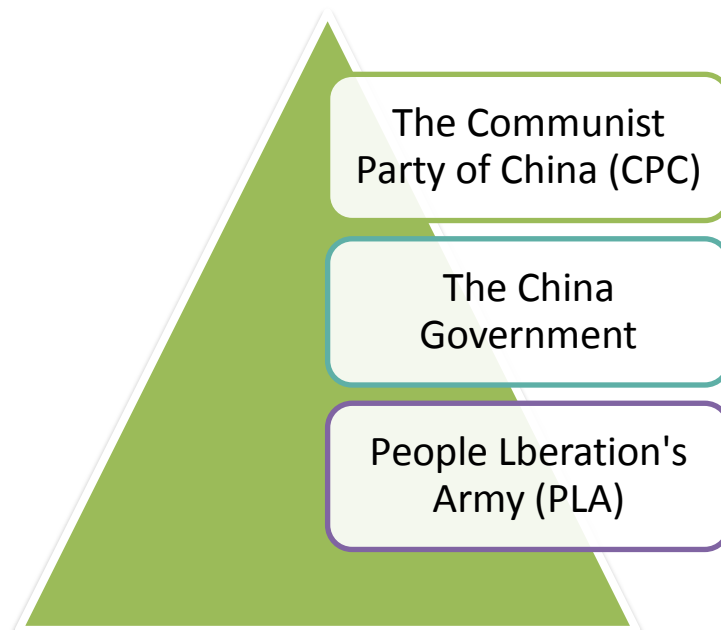
tugas konstitusional yang serupa dengan badan-badan parlementer yang ada di negara lain (Melati, 2013, hal. 13).

Geliat dan pengaruh China dalam bidang politik dapat dilihat dari adanya peran China yang semakin memegang proporsi besar dalam berbagai agenda internasional. Profesor Fakultas Politik Universitas Oxford menyampaikan bahwa keanggotaan dan peran strategis yang dimiliki China dalam *United Nations* (UN) sebagai *Intenational Governmental Organization* berpengaruh di dunia telah menjadi pintu pembuka bagi China untuk turut memainkan peran penting di tatanan global (CRI, 2016). Laporan berita dari Deutsche Welle (DW) sebuah pusat penyiaran berita dan informasi dari Jerman melalui tulisan pada tanggal 24 April 2016, menyebutkan apabila China merupakan negara yang memiliki kemampuan diplomasi yang kuat di dunia Internasional. Dukungan politik atas klaim wilayah yang terjadi pada konflik Laut China Selatan dapat menjadi salah satu cerminan atas kekuatan diplomasi China. Setidaknya terdapat 40 negara yang telah mendeklarasikan dukungan politiknya kepada China dalam kasus tersebut, termasuk Srilanka dan Zimbabwe (Sari, 2016).

Dalam sistem politik China, dikenal adanya hubungan vertikal power sebagai struktur kekuasaan negara dengan basis ideologi komunis. Ideologi tersebut menjadi ruh dalam setiap aktivitas politik negara tirai bambu tersebut. Tiga vertikal power tersebut ialah keberadaan The Communist Party of China (CPC), The State Council dan The People's Liberation Army (PLA). Terlepas dari adanya *overlapping* atau tumpang tindih dalam aspek fungsi

antara CPC dan The State Council karena keduanya memiliki pemimpin yang sama, namun kaitannya dengan penyusunan politik luar negeri China, ketiga aktor tersebut merupakan *official decision maker* sekaligus *foreign policy actors* di China (Jokobson & Knox, 2010, hal. 4). Berikut merupakan gambar ilustrasi dari tiga struktur kekuatan politik di China.

Gambar 2.1 Struktur Kekuatan Politik China



Sumber: Robert G. Sutter, *Chinese Foreign Relations* (Sutter, 2010, hal. 45)

Terkait dengan mekanisme politik dalam penyusunan politik luar negeri, *top-level* aktor politik yaitu, partai, pemerintah dan pimpinan militer merupakan aktor pengaruh dominan pada *final decision* atau keputusan akhir khususnya dalam penyusunan politik luar negeri dimana isu keamanan nasional menjadi topik pembahasan penyusunan (Sutter, 2010, hal. 45). Terkait dengan peran *The Ministry of Foreign Affairs* (Kementerian Luar

Negeri) dalam penyusunan politik luar negeri, kementerian mengalami degradasi pada kekuatan institusi sebagai *policy maker* di China. Pasalnya, keadaban China yang semakin kuat di tatanna internasional mendorong China untuk hadir sebagai suatu negara yang harus jeli dalam mengelola segala isu di luar negaranya (Jakobson & Knok, 2010, hal. 8). Dalam laporan tertulis dari *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) pada tahun 2010, *New Foreign Policy Actors in China*, dijelaskan apabila hal tersebut menyebabkan adanya perubahan tatatan fungsi yang melibatkan aktor lain untuk turut mengambil peran dalam pemantauan dan menjadi pelaksana dalam urusan luar negeri China, khususnya peran partai, pemerintah dan pemimpin militer China. Sejak tahun 1998, fungsi kementerian tersebut bertindak sebagai pelaksana tugas urusan luar negeri atau pelaksana kebijakan politik luar negeri China .

## **B. Lanskap Kondisi dan Potensi Ekonomi China**

China merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting dalam tatanan global. Pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi indikator utama bagi China untuk semakin dapat menunjukkan eksistensi atas perannya di panggung internasional (Uckert, 1995). Data ekonomi menunjukkan bahwa China merupakan negara dengan kuantitas perdagangan terbesar keempat di dunia, posisi ini berubah dari urutan 32 pada tahun 1978 dan 10 pada tahun 1997. Angka Gross Domestic Product (GDP) 13.00 persen, menempatkan China menjadi negara terbesar kedua setelah Amerika Serikat dalam hal produksi komoditas pada tahun 2005. Pertumbuhan ekonomi China menyentuh angka

9.5 persen pada setiap tahunnya dalam kurun dua puluh tahun terakhir. Keputusan China untuk masuk menjadi anggota *World Trade Center* (WTO) pada tahun 2001 justru menjadi katalisasi bagi kemajuan China karena telah memberikan dorongan bagi China untuk menjadi negara dengan perekonomian yang terbuka (Dellios, 2005). Perkembangan serta peran tersebut telah melahirkan China sebagai adidaya baru yang sedang terus menggeliat dan berusaha menancapkan pengaruh kuatnya di kawasan Asia Pasifik (Wuryandari G. , Elisabeth, Mashad, Muna, & Sriyanto, 2011).

Kemunculan China sebagai mitra baru utama global yang patut diperhitungkan telah menjadi salah satu hal yang luar biasa dalam melihat perkembangan ekonomi global dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1980, China telah mengubah dirinya menjadi mitra global terkemuka. Peran aktif China dalam integrasi ekonomi melalui perdagangan dan investasi menjadi alasan utama tas posisi keberhasilan ekonomi China saat ini. Kini, China merupakan jaringan (*link*) penting bagi berbagai negara global, khususnya dalam bidang jaringan produksi (Ozyurt, 2010, hal. 1). Di bawah kebijakan reformasi China pada tahun 1978, *Open-Door Policy* (kebijakan pintu terbuka) dalm sektor investasi dan perdagangan internasional, pertumbuhan China telah menemukan jalan baru yang tepat. Pada tahun 1978, total volume perdagangan luar negeri atau jumlah nilai ekspor dan impor China hanya mencapai sebesar 7% pendapatan nasionalnya. Kebijakan pintu terbuka yang diprakarsai oleh Presiden Deng Xiaoping telah mendorong colume perdagangan dan investasi luar negeri China meningkat menjadi 25%



pada tahun 1987 dan tahun 1998 meningkat menjadi 37%. Sejumlah reformasi lembaga turut mendorong perkembangan pasar China tersebut, seperti dalam kerangka birokrasi, China memberikan otonomi dalam mempromosikan ekspor keunggulan wilayah pada setiap provinsinya. Berbagai perusahaan perdagangan dan industri manufaktur didirikan untuk memfasilitasi desentralisasi kegiatan perdagangan (Chow, 2004, hal. 131).

Dalam melihat potret reformasi dan pertumbuhan ekonomi China hingga saat ini menjadi kekuatan ekonomi global, maka dapat dilihat pada dua fase pembangunan ekonomi China yaitu: (1) Fase Maois (1949) dan Fase Reformasi (1978-seterusnya). Periode pembangunan era Maois ditandai dengan adanya kemandirian dan isolasi China dari perekonomian internasional. Selama masa periode Maois, perekonomian China sangat diatur dan dikendalikan oleh pusat otoritas pemerintah, termasuk dalam hal produksi dan keputusan penentuan harga pasar. Di bawah ekonomi tersebut, investasi asing China hampir tidak ada. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri merupakan suatu kebijakan monopoli negara. Sebagian besar import terkonsentrasi pada barang modal penting dan teknologi dari negara Uni Soviet. Pada fase reformasi, inisiatif dari pengganti Maois, Deng Xiaoping telah memberikan pergeseran besar pada sistem ekonomi China yang lebih terbuka pada dunia. Reformasi tersebut dimulai pada tahun 1978 dimana pemerintah memberikan liberalisasi keputusan harga serta melakukan deregulasi hampir setengah harga di sektor industri. Dengan adanya deregulasi ekonomi tersebut, China memulai babak

baru perekonomian yang lebih interaktif dengan dunia internasional (Ozyurt, 2010, hal. 3).

Tabel 2.2 *Timeline* Reformasi Ekonomi China (1978-2004)

Tahun	Perubahan Kebijakan
1978	Inisiasi “ <i>Open-Door Policy</i> ” dimulai, fokus pada perdagangan dan investasi luar negeri
1979	Keputusan untuk mengubah pertanian kolektif; Perusahaan desa dan kecamatan diberikan dorongan kuat untuk produksi
1980	Zona keonomi khusus telah dibuat
1984	Negara mendorong <i>Self-proprietorships</i> (kepemilikan ekonomi privat)
1986	<i>Provisional bankruptcy law</i> (hukum kepailitan sementara) dijalankan untuk perusahaan milik negara
1987	Sistem tanggung jawab kontrak mulai dikenalkan oleh perusahaan milik negara
1988	Awal penghematan biaya produksi pada Township and village enterprises (TVEs)
1990	Sistem bursa dimulai di Shenzhen
1993	Keputusan untuk mendirikan “socialist market economic system”
1994	Hukum perusahaan mulai diperkenalkan
1995	perubahan persyaratan kontrak untuk staf perusahaan milik negara
1996	konvertibilitas penuh untuk transaksi giro
1997	Rencana untuk merestrukturisasi banyak perusahaan milik negara dimulai
1999	amandemen konstitusi secara eksplisit mengakui kepemilikan pribadi
2001	China bergabung dengan <i>World Trade Organization</i> (WTO)
2002	The Communist Party of China mendukung peran sektor swasta serta mengundang pengusaha untuk bergabung
2003	Keputusan untuk melaksanakan keputusan untuk sistem ekonomi pasar sosialis secara total
2004	Konstitusi telah diubah untuk menjamin hak milik pribadi

Sumber: Selin Ozyurt, *China’s Economics Outlook after 30 Years of Reform* (Ozyurt, 2010, hal. 5)

Sejak reformasi China dan bidang perdagangan dan investasi. Dalam bidang perdagangan, China dengan cepat dapat mengubah negaranya menjadi mitra dagang signifikan baik di asia pasifik atau

tatanna internasional secara luas. Hal ini berbeda dengan tahun 1980 diman asaat itu China masih menggunakan sistem ekonomi yang relatif tertutup, rekam jejak perdagangan China mencatat senilai US\$ 37 miliar menjadi angka pendapatan China dalam sektor perdagangan. Perdagangan China pada saat itu memberikan kontribusi sebesar 12.4% dalam GDP. Pada tahun 1994, perdagangan produk industri China meningkat ke US\$ 260 miliar dan menjadikan China tampil sebagai aktor ekonomi baru global dalam bidang perdagangan internasional. (Lam, 1997, hal. 17).

Sebagai negara yang telah bergantung pada sektor perdagangan dan investasi dalam pertumbuhan ekonominya, Afrika menjadi salah satu kawasan penting kaitannya dengan kemitraan ekonomi China dalam dua hal tersebut. Bagi China, Afrika merupakan kawasan penyedia bahan baku seperti minyak, bijih besi, dll yang dalam ditempatkan sebagai faktor produksi China untuk industrinya. Sedangkan bagi Afrika, China merupakan mitra dagang utama dan investor yang menyediakan proyek produk konsumen murah, pembeli sumber daya alam mereka, dan membantu membangun infrastruktur di kawasan Afrika (Gamache, Hammer, & Jones, 2013, hal. 1).

### **C. Lanskap Kondisi dan Potensi Militer China**

Ambisi China sebagai kekuatan adidaya baru juga tampak dalam persiapan dan kesiapan negara tersebut untuk melakukan reformasi secara progresif dalam kekuatan militernya. Hal ini dapat terlihat dari adanya kenaikan pada anggaran militer yang luar biasa pada satu dekade terakhir.

Dalam pidatonya di pembukaan Kongres Rakyat Nasional ke-10 (NPC) pada tanggal 5 Maret 2007, Perdana Menteri China Wen Jiabo tidak menyebutkan mengenai anggaran militer negaranya. Namun, sehari sebelum kongres berlangsung juru bicara NPC, Jiang Enxhu menyatakan bahwa anggaran pertahanan China yang diajukan mengalami kenaikan sebesar US\$ 44,94 miliar atau naik sebesar 17,8% dibanding dengan anggaran tahun sebelumnya (anggaran tahun 2006) naik 14,7% dibandingkan dengan tahun 2005. Kemajuan tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya upaya China dalam melakukan modernisasi atau reformasi pada kekuatan militernya.

Perkembangan pemikiran pertahanan Cina moderen bermula pada dekade 1930-an dan 1940-an yang lebih mengedepankan pada dua komponen strategi, yakni pertahanan teritorial atau darat (territorial defense) dan pertahanan pantai (coastal defense). Saat itu bagi Cina, esensi pertahanan keamanan adalah seperti yang termuat dalam doktrin “Perang Rakyat” (People’s War). Secara implisit “Perang Rakyat” mengandalkan unsur manusia, operasi infanteri, dan perang gerilya. Bahkan dalam konsepsi Mao Zedong, perang gerilya inilah yang menjadi inti dari strategi pertahanan. Maka itu sampai awal tahun 1980-an strategi 2 pertahanan pantai hanya menjadi komponen kedua dalam strategi pertahanan nasional Cina. Kedua strategi pertahanan Cina di atas tidak terlepas dari kebutuhan lingkungan strategis saat itu yakni untuk menangkal ancaman berupa agresi konvensional dan menghadang musuh di perbatasan.

Sejak awal tahun 1980-an Cina menerapkan strategi “pertahanan aktif” (jiji fangyu) yang selaras dengan upaya pembangunan ekonomi “lompatan jauh ke depan” yang dicanangkan Deng Xiaoping. Secara demikian kebijakan pertahanan Cina harus disubordinasikan pada dan ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, Doktrin “pertahanan aktif” dimaksudkan untuk menghadapi tiga jenis perang, yakni: perang dunia; perang skala luas dalam menghadapi agresi negara asing terhadap Cina; dan konflik perbatasan atau perang terbatas. Dari ketiga kemungkinan perang tersebut sejak pertengahan tahun 1980-an para elit strategi Cina yakin bahwa jenis perang ketiga yang akan mungkin terjadi. Karena itu sampai saat ini berbagai simulasi strategi perang-perang regional dan terbatas (youxian zhubu zhanzheng) kerap dikembangkan Cina. Menjelang akhir 1980-an strategi pertahanan Cina mulai memperhitungkan arti penting pertahanan maritim dan udara dalam doktrin pertahanan aktif melalui pengenalan “strategi pertahanan air hijau” (jijide jinhai fangyu zhanlie). Strategi pertahanan ini melakukan restrukturisasi prioritas pengembangan angkatan bersenjata dari ketiga kekuatan matra udara, laut dan darat dalam upaya membangun kemampuan gerak cepat (rapid response capability) untuk menghadapi perang-perang regional dan terbatas atau konflik intensitas rendah (low intensity conflicts) di sekitar wilayah Cina. Lebih lanjut, pada awal tahun 1990-an doktrin pertahanan aktif kembali direvisi. Secara eksplisit angkatan bersenjata Cina menetapkan prioritas pengembangan

pada angkatan laut dan udara. Militer didorong untuk melaksanakan konstruksi kualitatif militer, yakni upaya untuk meningkatkan kemampuan operasi militer yang dikombinasikan dengan teknologi persenjataan yang tinggi.

Doktrin modernisasi kualitas militer ini menjadi filosofi yang melandasi pengembangan militer Cina sejak tahun 1992 sampai saat ini. Secara demikian dapat dikaji bahwa keinginan Presiden Hu Jintao kali ini untuk meningkatkan kekuatan militer Cina merupakan implementasi dari doktrin pertahanan aktif dan konstruksi kualitatif militer yang menjadi landasan strategi pertahanan periferal dan proyeksi masa depan (*forward projection*) dalam rangka mengantisipasi perang-perang regional dan terbatas. Hal itu dapat terlihat dari besarnya perhatian Cina terhadap pembentukan unit-unit tempur taktis, pengembangan kekuatan angkatan laut dan udara serta pengembangan kualitas dan 3 teknologi persenjataan melalui program penelitian dan pengembangan yang intensif. Kemudian, meningkatnya perhatian Cina terhadap perang-perang intensitas rendah mendorongnya untuk mengembangkan unit-unit pasukan gerak cepat (*Rapid Reaction Units*) atau kuaisu budui untuk mengamankan kepentingan-kepentingan maritim dan klaim-klaim teritorial dan lepas pantainya. Cina juga banyak mempelajari pengalaman negara-negara lain seperti AS, Perancis, dan Inggris dalam mengembangkan pasukan gerak cepat, khususnya yang berkenaan dengan daya guna unit-unit pasukan

gerak cepat dalam menghadapi pertempuran dengan calon agresor, terorisme, dan kekacauan di dalam negeri (Yani, 2007, hal. 1-2).

Perkembangan kekuatan militer China banyak menarik perhatian negara-negara khususnya di kawasan Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, Korea Utara dan Taiwan. Pertumbuhan kekuatan militer China yang pesat menimbulkan adanya rasa kekhawatiran dan ancaman terhadap negaranegara tetangganya. Banyak isu yang kemudian muncul terkait dengan motif China melakukan transformasi kekuatannya, salah satunya adalah perkembangan militer China yang didasari oleh adanya motif untuk mencapai posisi sebagai negara terkuat secara regional dan global.

China memiliki militer dengan 2,3 juta personel aktif dan 1,2 juta personel cadangan. Untuk kekuatan darat, China memiliki 1,9 juta personel, 14 ribu tank, 14.500 satuan artileri dan 453 helikopter. Sedangkan untuk kekuatan udara, China memiliki 470 ribu personel, 2.556 pesawat tempur, 400 jet penyerang. Untuk kekuatan laut, China memiliki 250 ribu personel, 66 kapal selam, 27 kapal perusak, dan 52 perгат (frigate). Sementara di gudang senjata, China memiliki 100 ribu personel, 140 rudal nuklir, 1.000 anti-rudal.<sup>2</sup> Kekuatan militer China yang didukung dengan besarnya jumlah personel dan peralatan militer tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya kekuatan militer China. China tentu perlu meningkatkan kualitas maupun kuantitas kekuatannya dengan melihat ancaman yang sangat besar dari kekuatan luar. Di matra laut,

China cukup berjaya. Kapal perang berjumlah 760 unit, kapal pengangkut 1822 unit, pelabuhan utama 8, pengangkut pesawat 1 unit, kapal penghancur 21 unit, kapal selam 68 unit, fregat 42, kapal patroli pantai 368 unit, kapal penyapu ranjau sekitar 39 unit, dan kapal amfibi sekitar 121 unit.<sup>12</sup> Secara alamiah, China menerapkan kebijakan pertahanan nasional yang defensif. China memprioritaskan perlindungan terhadap kedaulatan nasional, keamanan, integritas teritorial, pengamanan kepentingan pembangunan nasional, dan kepentingan orang-orang china di atas segalanya . China berusaha membangun pertahanan dan meningkatkan kekuatan militer untuk menjaga keamanan nasional dan kepentingan pembangunan nasional China. Andrew Erickson mengemukakan bahwa aktivitas peningkatan secara signifikan militer China bukan untuk memulai sebuah perang baru di kawasan Asia Timur, melainkan berusaha untuk menguasai perkembangan militer. Perkembangan militer dapat digunakan untuk memenangi persaingan tanpa pertempuran sesungguhnya dengan menggentarkan tindakan-tindakan yang diidentifikasi sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional China (Yani, 2007, hal. 8-9). Beberapa faktual riil terkait militer tersebutlah yang kemudian membawa China tampil sebagai aktor militer yang cukup pantas diperhitungkan dalam skala global.

Modernisasi militer China yang dilakukan selama ini tentu dilakukan dengan adanya pertimbangan dan alasan yang jelas bagi masa depan militer China. Terdapat beberapa hal baik dari sisi internal dalam



negeri China maupun dari luar China yang menjadi faktor pendorong perlunya dilakukan modernisasi kekuatan militer khususnya yang dilakukan oleh Hu Jintao. Faktor pendorong tersebut di antaranya yaitu:

1. Adanya Kebutuhan Menjaga Keamanan Negara

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara memiliki kebutuhan untuk menjaga keamanan negara. Hal demikian yang menjadi landasan dasar upaya menjaga keamanan negara serta menjadikan aspek pertahanan keamanan menjadi salah satu tujuan negara. Terlebih lagi China merupakan negara yang rawan mengalami konflik dengan negara tetangganya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan dan strategi pertahanan maupun militer yang lebih baik melalui modernisasi militer. Hal demikian membuat modernisasi kekuatan militer China dijadikan salah satu prioritas oleh Hu Jintao dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan pertahanan keamanan yang baru.

2. Keinginan Mengejar Ketertinggalan dari Perkembangan Barat

Dalam hal ini China memiliki keinginan untuk membangun kembali statusnya sebagai negara sebagai pusat peradaban. Kejayaan masa lalu China tersebut diikuti dengan adanya keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara Barat.